

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INGGRIS ATAS HAK TINGGAL IMIGRAN PASCA REFERENDUM *BREXIT* UNI EROPA

Sofya Ramli¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The UK's exit from the European Union is a major consideration for the UK as it could directly impact the UK's sovereignty and economy in the long term. With the implementation of the Brexit referendum, there was a lot of unrest between the pros (supporters) and cons (opponents) of the Brexit Referendum. However, the situation was emphasized by the British prime minister named Theresa May and delivered a statement "Brexit means Brexit" which statement has many meanings (ambiguous) but the statement does not leave the realm of political relations between the UK and the European Union. The statement was then followed by "I want my country back" and "take back control", which is interpreted as taking back British sovereignty as an independent country without interference from the European Union. Brexit is an abbreviated form of the term "British Exit" which is interpreted as a British policy to carry out a referendum so that the British people can make a decision to leave or remain a member state of the European Union. The "Brexit" referendum was held on June 23, 2016 and was carried out simultaneously in several member states of the United Kingdom, namely England, Scotland, Wales, and Northern Ireland where the implementation was led by former British Prime Minister David Cameron. Before his term of office ended in 2016, David Cameron addressed the issue of Brexit with a statement asking the European Union to give its member states the opportunity to vote to stay or leave EU membership.

Keywords: Brexit, Immigrant, European Union, Policy, Right of Residence.

ABSTRAK

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa merupakan pertimbangan yang cukup besar bagi Inggris dikarenakan dapat berdampak secara langsung terhadap kedaulatan dan perekonomian Inggris dalam jangka waktu yang panjang. Dengan dilaksanakannya referendum *Brexit*, maka timbul banyaknya keresahan yang terjadi antara pihak *pro* (pendukung) maupun *kontra* (penentang) dari Referendum *Brexit* tersebut. Namun situasi tersebut ditegaskan oleh perdana menteri Inggris yang bernama Theresa May dan menyampaikan pernyataan "*Brexit means Brexit*" yang mana pernyataan tersebut memiliki banyak arti (ambigu) namun pernyataan tersebut tidak keluar dari ranah hubungan politik antara Inggris dan Uni Eropa. Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan dengan "*I want my country back*" dan "*take back control*", yang mana diartikan sebagai pengambilan kembali kedaulatan Inggris sebagai negara independen tanpa adanya campur tangan dari Uni Eropa. *Brexit* adalah bentuk singkatan dari istilah "*British Exit*" yang diartikan sebagai kebijakan Inggris untuk melaksanakan referendum agar masyarakat Inggris dapat membuat keputusan keluar atau menetapnya menjadi negara anggota Uni Eropa. Referendum "*Brexit*" sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 dan dilakukan secara serentak di beberapa wilayah anggota Britania Raya, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dimana pelaksanaan tersebut dipimpin oleh eks-Perdana Menteri Inggris yang bernama David Cameron. Sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, David Cameron membahas isu *Brexit* dengan pernyataannya yang meminta pihak Uni Eropa untuk memberikan kesempatan untuk memilih kepada negara anggotanya untuk menetap atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Kata kunci: *Brexit*, Imigran, Uni Eropa, Kebijakan, Hak Tinggal.

dilakukan secara serentak di beberapa wilayah anggota Britania Raya, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dimana pelaksanaan tersebut dipimpin oleh eks-Perdana Menteri Inggris yang bernama David Cameron (Tidore, 2017). Cameron membahas isu *Brexit* dengan pernyataannya yang meminta pihak Uni Eropa untuk memberikan kesempatan untuk memilih kepada negara anggotanya untuk menetap atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Isu pengeluaran Referendum “*Brexit*” oleh Inggris merupakan kebijakan yang berisi tentang keluarnya keanggotaan Inggris dari Institusi Internasional Uni Eropa. Untuk langkah berikutnya, pemerintah Inggris juga memicu Pasal 50 (*Article 50*) yang berisikan tentang mekanisme hukum keluarnya keanggotaan Uni Eropa. Untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, pemerintah Inggris harus memberikan pemberitahuan formal kepada Dewan Eropa yang kemudian akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri negara tertentu yang ingin keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Institute For Government, 2016).

Namun, ketika Inggris mengeluarkan referendum terjadi perselisihan pada saat Inggris menandatangani Perjanjian Maastricht yang saat itu merupakan perjanjian yang membentuk Uni Eropa dalam upaya menciptakan integrasi yang lebih luas yang menggunakan sistem yang terbagi menjadi dua yaitu supranasional (terpusat) oleh sebagian negara dan *intergovernmental* (antar pemerintah). Perjanjian tersebut banyak memunculkan masalah baru di dalam masyarakat Inggris dikarenakan perjanjian tersebut berisikan tentang pengadopsian mata uang *Euro* (*single currency*) yang dilaksanakan pada tahun 1999 dan hal tersebut berlawanan dengan Inggris dikarenakan Inggris menggunakan mata uang *Poundsterling* yang nilainya melebihi mata uang *Euro*. Selain itu, Perjanjian Maastricht juga mengadopsi kebijakan bebas untuk bergerak antar negara anggota sehingga hal tersebut yang mengakibatkan meningkatnya jumlah imigran yang masuk Inggris.

Pada saat Inggris menjadi anggota Uni Eropa selama hampir lima dekade, Inggris mengalami pertumbuhan pesat terhadap jumlah imigran yang masuk ke Inggris, khususnya imigran yang berasal dari negara anggota Uni Eropa tepatnya di bagian Eropa Tengah dan Eropa Timur. Imigran-imigran Uni Eropa banyak memilih Inggris sebagai salah satu target utama untuk menetap dikarenakan oleh faktor perekonomian Inggris yang relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa dan memiliki sistem jaminan sosial yang baik.

Pada tahun 2004, jumlah imigran yang masuk ke Inggris telah meningkat secara signifikan dan menurun akibat dari resesi pada tahun 2007. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah imigran masuk kembali meningkat secara signifikan yang juga diiringi oleh pemulihan ekonomi Inggris. Pada tahun 2015, Inggris mencatat secara total 257.000 warga negara Uni Eropa telah tiba di Inggris dan diantaranya dengan 172.000 warga yang menetap dan 85.000 warga telah meninggalkan Inggris. Selain itu juga tercatat sebanyak 191.000 warga negara yang bukan berasal dari Uni Eropa (Wadsworth, 2016, pp. 2-3). Selama 20 tahun bergabung menjadi anggota Uni Eropa, jumlah imigran yang masuk Inggris telah meningkat secara signifikan terutama pada tahun 1995 hingga tahun 2015. Jumlah imigran yang masuk Inggris telah meningkat sebanyak tiga kali lipatnya dari 0,9 juta sampai 3,3 juta jiwa. Jumlah populasi juga meningkat 3,2% menjadi 5,3% berawal dari 1,5%. Sebanyak 2,5 juta imigran berumur 16-64 tahun dan dua juta diantaranya yang menetap di Inggris untuk bekerja.

Inggris menanggapi jumlah imigran yang keluar ataupun masuk Inggris tidak sepenuhnya buruk, akan tetapi berpotensi sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inggris. Dalam waktu 20 tahun, imigran memberikan arti yang cukup penting bagi Inggris. Namun pasca referendum pada tanggal 1 Januari 2021, pemerintah Inggris mulai merumuskan kebijakan baru untuk mengatur arus imigran dalam kebijakan yang disebut dengan "*Point-based Immigration*". Pemerintah Inggris menerapkan kebijakan bagi imigran yang ingin berkunjung ataupun menetap di Inggris. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah imigran yang masuk ke Inggris dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk keterampilan, tawaran pekerjaan, dan kemampuan berbahasa Inggris.

Arus imigran yang masuk ke Inggris merupakan isu utama yang dialami oleh pemerintah Inggris dikarenakan mengancam pertumbuhan Inggris baik secara finansial maupun kedaulatannya. Melakukan pembatasan arus masuk yang dilakukan Inggris dengan tujuan untuk mengurangi risiko tersebut merupakan salah satu langkah Inggris untuk meningkatkan pertumbuhan negaranya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis "bagaimana kebijakan Inggris terkait aturan imigran pasca Referendum Brexit tahun 2015-2020 ?"

KERANGKA ANALITIK

Pendekatan Neo-Realisme

Penelitian ini menggunakan pendekatan neo-realisme yang memfokuskan pada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi, serta adanya kesinambungan dan perubahan sistem (Jackson & Sorensen, 2014, p. 136). Kenneth Waltz menganggap bahwa negara memiliki kedaulatannya masing-masing dan negara tersebut dapat menentukan bagaimana negara tersebut dapat menghadapi permasalahan internal dan eksternalnya (Jackson & Sorensen, 2014, p. 140). Artinya, suatu kedaulatan dapat dilihat dari adanya sifat ketidaktergantungan suatu negara terhadap negara lainnya, bebas dan tidak adanya tekanan dari negara lain untuk memerintah mereka. Selain itu, neo-realisme berasumsi bahwa struktur internasional akan mempengaruhi perilaku aktor (negara).

Pendekatan neo-realisme digunakan dalam penelitian ini terutama untuk menganalisis kebijakan luar negeri Inggris pasca Referendum *Brexit*, dimana isu tersebut akan berdampak terhadap perilaku Inggris dalam proses pembuatan kebijakan dikarenakan isu tersebut melibatkan adanya faktor kepentingan yang diejawantahkan melalui kebijakan luar negeri dari aktor lain, antara lain dari Uni Eropa. Neo-realisme melihat isu *Brexit* sebagai salah satu fenomena bagaimana struktur internasional dapat mempengaruhi perilaku suatu negara, seperti dengan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropa yang dianggap tidak menguntungkan bagi Inggris menyebabkan Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa yang mana tindakan tersebut juga akan berdampak pada pertumbuhan kedua aktor tersebut.

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional suatu negara dalam pandangan neo-realisme menganggap bahwa negara sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, rasional, dan lebih mengedepankan keuntungan relatif. Suatu negara dalam mencapai suatu kepentingan nasionalnya akan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor variabel penentu yang memiliki peran dalam formulasi kepentingan nasional. Kepentingan nasional diciptakan oleh berbagai peran aktor dan beberapa faktor penentu yang mana akan memperlihatkan arah dari pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Charles Chong, yang memiliki tiga dimensi dalam

kepentingan nasional diantaranya yaitu *politics, community, dan economic* (Chong, 2017).

Konsep kepentingan nasional digunakan oleh peneliti untuk membantu menganalisis kebijakan Inggris terhadap masuknya imigran pasca Referendum *Brexit* tahun 2015-2020. Tiga faktor kepentingan yang dikemukakan oleh Charles Chong memiliki cakupan yang luas sebagai landasan untuk menganalisis kepentingan Inggris dan Uni Eropa atas terlaksanakannya Referendum *Brexit* tersebut. Dalam menggunakan tiga faktor tersebut, peneliti dapat memberikan contoh asumsi-asumsi dasar dalam menganalisis masalah ini. Ketiga faktor tersebut dapat diejawantahkan melalui sebab dan akibat dari meningkatnya jumlah imigran yang masuk ke Inggris.

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai bentuk cerminan serta bentuk hasil kepentingan nasional suatu negara yang mana akan berfungsi dalam melakukan penelitian ini. Kebijakan luar negeri juga dapat dijadikan sebagai suatu instrumen analisis yang mana dengan meneliti kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita dapat mengetahui arah dan arti dari kepentingan nasional suatu negara itu sendiri. Kebijakan luar negeri juga akan searah dengan politik dalam negeri sehingga dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, kita juga dapat melihat politik dalam negeri suatu negeri yang juga akan mengarahkan kepada suatu kerangka analisis mengenai kepentingan nasional suatu negara. Pelaksanaan Referendum *Brexit* yang dilakukan oleh Inggris terhadap Uni Eropa akan menjadi indikator dalam meneliti kepentingan nasional. Kebijakan Inggris mengeluarkan referendum merupakan hal yang penting untuk diteliti dikarenakan hal tersebut akan menunjukkan arah kebijakan terhadap kepentingan nasionalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana variabel-variabel serta permasalahan yang diteliti sangat kompleks dan bersifat dinamis sehingga pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif. Adapun tipe penelitian yaitu bersifat eksplanatif yang difokuskan pada hubungan sebab-akibat diantara dua fenomena atau lebih (Siyoto, 2015). Penelitian eksplanatif dipakai untuk menentukan apabila suatu eksplanasi yang aman adanya keterkaitan sebab-akibat, valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid diantara dua atau lebih unit eksplanasi yang saling

bersaing. Peneliti menggunakan tipe penelitian eksplanatif dikarenakan penelitian ini menggunakan variabel bagaimana implementasi kebijakan Inggris terhadap masuknya imigran pasca Referendum *Brexit* tahun 2015-2020.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai landasan pemikiran dalam melakukan penelitian ini. Adapun sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis adalah data-data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, artikel, dan dokumen penting lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini (Koenjaraningrat, 1983, p. 42). Dengan metode penelitian yang telah diterapkan, maka peneliti dapat menganalisis tentang bagaimana implementasi kebijakan Inggris terhadap masuknya imigran pasca Referendum *Brexit* tahun 2015-2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam buku Sugiyono) yaitu melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Kemudian, pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data dan bahan referensi untuk memperkuat temuan yang telah dibuat oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Referendum *Brexit* merupakan titik awal perubahan Inggris dalam mencapai kepentingan nasional negaranya. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa sudah pasti akan mempengaruhi Inggris dikarenakan hampir seluruh struktur kebijakan Inggris didasari oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, sehingga kebijakan luar negeri maupun dalam negeri Inggris akan satu arah dengan kebijakan Uni Eropa. Dengan terlepasnya regulasi Uni Eropa, Inggris dapat lebih mengembangkan struktur kedaulatan negaranya dan juga dapat menentukan arah yang akan dipilih untuk negaranya sendiri.

Referendum *Brexit* Terhadap Inggris Sebagai Dampak Eksternal

Pada masa transisi, Inggris telah membuat rencana-rencana baru terkait lepasnya Inggris dari ikatan Uni Eropa yang mana rencana-rencana tersebut mencakup pada sektor ekonomi, politik, sampai dengan imigrasi.

a. Referendum *Brexit* Terhadap Ekonomi Inggris

Dengan keluarnya Inggris dari kebijakan pasar tunggal Uni Eropa, Inggris

dibebaskan dari peraturan Uni Eropa. Namun, para pedagang akan memerlukan skema dan format produk baru untuk memenuhi peraturan yang berbeda di pasar yang berbeda, yang akan menghambat rute perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa dan antara Inggris dan Irlandia Utara. Perjanjian antara Inggris dan Uni Eropa berisi ketentuan yang akan diterapkan untuk memastikan kesetaraan antara Inggris dan Uni Eropa setelah Inggris berhenti menjadi anggota Uni Eropa. Peraturan ini mencakup bantuan negara, persaingan, perpajakan, standar hidup Eropa dan perlindungan tenaga kerja dan sosial.

Selanjutnya, hubungan perdagangan yang terjalin antara Inggris dan Uni Eropa akan berbasis aturan-aturan perdagangan yang ada di WTO (*World Trade Organization*). Skenario ini menggambarkan Inggris yang telah keluar dari pasar tunggal dan perserikatan khusus dengan Uni Eropa dimana mengarahkan pada penegetaan hambatan perdagangan yang jauh lebih besar antara Inggris dan Uni Eropa. Aturan perdagangan yang digunakan akan mencantumkan tarif yang akan dikenakan pada negara-negara Uni Eropa serta juga akan berlaku pada perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa. Hambatan-hambatan non-tarif pun juga akan meningkat dikarenakan adanya aturan pemeriksaan yang terjadi di daerah perbatasan antar negara, penyesuaian aturan nasional di negara tersebut, harus menyerahkan sertifikasi produk yang akan masuk ke dalam suatu negara dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi lainnya.

Untuk melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca Referendum *Brexit* bagi ekonomi Inggris, setidaknya membutuhkan 10 hingga 20 tahun yang akan datang dikarenakan Inggris masih sedang dalam penyesuaian dalam menerapkan peraturan-peraturan baru setelah keluar dari Uni Eropa sehingga dampaknya belum terlihat secara signifikan.

b. Referendum *Brexit* Terhadap Politik Inggris

Inggris merupakan negara yang terbagi atas 4 bagian yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Pada saat pengumpulan suara dalam Referendum *Brexit*, Skotlandia dan Irlandia Utara memilih untuk tidak keluar dari Uni Eropa walaupun hasil yang didapat dari Referendum tersebut Inggris sebagai negara kesatuan memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Hal tersebut akan menimbulkan konflik

baru yang terjadi di Inggris sebagai negara kesatuan, yang mana akan memicu adanya perpisahan atau pembubaran negara kesatuan tersebut antara Inggris, Skotlandia dan Irlandia Utara.

Kemudian dampak lainnya yang akan dirasakan oleh Inggris pasca Referendum *Brexit* yaitu memunculkan Euro Skeptisisme. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat atau tidak dapat diselesaikan akan didasari pada tindakan yang dilakukan Inggris dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di Uni Eropa. Peneliti beranggapan bahwa hubungan politik antara Inggris dan Uni Eropa akan terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, namun baik atau buruknya hubungan tersebut akan dilihat dari sistem atau model politik yang dipakai Inggris di waktu yang akan datang.

Kebijakan Luar Negeri Inggris Terkait Imigran Pasca Referendum *Brexit* Tahun 2016-2020

Kebijakan *free of movement* yang harus diterapkan oleh negara anggota Uni Eropa telah menyebabkan terhadap peningkatan jumlah imigran secara signifikan, baik yang menetap ataupun berkunjung. Dampak internal dari kebijakan tersebut telah membenani negara termasuk Inggris. Berdasarkan jumlah imigran yang masuk Inggris setiap tahunnya meningkat walaupun pada tahun 2016 Inggris telah menyatakan akan melaksanakan Referendum *Brexit*. Peningkatan jumlah imigran tersebut berasal dari warga negara Inggris yang pada saat itu berada di luar Inggris dan memutuskan untuk kembali ke Inggris, warga negara Eropa yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Inggris, begitu juga pun dengan imigran yang berasal dari luar kawasan Eropa yang mana dilatarbelakangi oleh kesempatan mendapatkan lowongan pekerjaan yang lebih baik, melanjutkan tingkat pendidikan, dan latar belakang keluarga. Pemerintah Inggris telah mencatat sekitar 21 juta pendatang telah masuk Inggris di bulan September 2021 termasuk warga negara Inggris yang kembali.

Pada saat menerapkan kebijakan *Freedom of Movement*, jumlah imigran Uni Eropa yang tercatat di Inggris terus meningkat hingga akhirnya Inggris melaksanakan Referendum *Brexit*. Dengan Referendum *Brexit* yang sudah terlaksanakan, jumlah imigran yang berasal dari Uni Eropa menurun secara progresif sehingga terbukti bahwa dengan adanya Referendum *Brexit* yang mana juga ditambah dengan Pandemi COVID-19, imigran asal Uni

Eropa paling terkena dampaknya. Dengan terlaksananya Referendum *Brexit* yang menyebabkan adanya penurunan dalam sektor ekonomi, politik hingga imigrasi. Pemerintah Inggris khususnya telah membuat regulasi dan persyaratan baru bagi imigran yang akan masuk serta yang ingin menetap di Inggris.

Pasca Referendum *Brexit*, pemerintah Inggris mulai menerapkan kebijakan “*Points Based Immigration System*” yang merupakan sistem imigrasi baru berbasis poin yang mana poin-poin tersebut dapat diperoleh dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh imigran agar dapat pergi ataupun menetap ke Inggris. Sebagai syarat untuk memenuhi sistem tersebut, para imigran harus mencapai minimum 70 poin untuk mendapatkan visa, diantaranya dibagi menjadi 3 tingkat yaitu:

1. Tingkat 1 (*Exceptional Talent/Global Leaders*)

Visa tingkat 1 ini ditujukan untuk para pemimpin global yang sudah diakui seperti pemimpin masa depan pada bidang sains, humaniora, teknik, seni dan teknologi digital, pendidikan, ekonomi dan kemasyarakatan. Ilmuwan dan peneliti unggulan juga dapat mengambil manfaat dari proses pengesahan yang lebih cepat sebagai bagian dari skema STEM jalur cepat. Pada tingkat ini, visa tersebut digunakan oleh para pemimpin negara yang mana akan diberikan kemudahan dalam proses imigrasinya. Kebijakan visa tersebut telah dipakai bukan hanya Inggris (baik sebelum ataupun setelah referendum), bahkan hampir di seluruh negara menggunakan kebijakan visa ini apabila ada pemimpin negara ataupun pemimpin yang berskala global yang akan mendatangi negaranya baik formal ataupun informal.

2. Tingkat 2 (*General*)

Visa tingkat 2 ditujukan untuk pekerja dengan jangka waktu panjang. Pekerja untuk mendapatkan visa ini harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kriteria oleh para pemberi pekerjaan yang mana rute tersebut telah didukung penuh oleh para pemberi kerja untuk pekerja terampil. Visa tingkat 2 ini juga mengizinkan para imigran untuk dapat berpindah tempat kerja dari perusahaan yang bersifat multinasional yang mana perusahaan tersebut akan membuat cabang baru di Inggris.

Kebijakan visa ini berbeda dengan kebijakan visa Inggris sebelum Referendum *Brexit*. Pada kebijakan visa tingkat 2 sebelum Referendum *Brexit*, pekerja yang

berasal dari Uni Eropa akan dengan mudah mendapatkan visa tingkat 2 tersebut dengan hanya menyertakan paspor. Berbeda dengan pekerja dari luar Uni Eropa yang harus melewati beberapa prosedur tertentu untuk mendapatkan visa tingkat 2 tersebut akibat dari kebijakan Uni Eropa yaitu *Freedom of Movement*. Oleh karena itu, dengan telah dilaksanakannya Referendum *Brexit*, semua pekerja baik yang berasal dari Uni Eropa ataupun dari luar Uni Eropa memiliki prosedur yang sama dengan tujuan setiap pekerja yang ingin bekerja di Inggris memiliki kesempatan yang sama.

3. Tingkat 3 (*Temporary*)

Visa tingkat 3 ini ditujukan pada para pelajar yang melanjutkan tingkat pendidikannya yang lebih tinggi. Visa ini akan diperbaharui atau ditingkatkan apabila pelajar yang sudah menempuh tingkat pendidikan setara dengan gelar Ph.D. (S-3) ingin melanjutkan jenjang karirnya di Inggris. Hal tersebut akan didukung penuh oleh pemerintah Inggris agar keahlian yang dimiliki oleh pekerja tersebut dapat dipergunakan secara optimal di Inggris. Kebijakan visa bagi pelajar ini, terdapat beberapa perbedaan antara kebijakan visa sebelum dan setelah Referendum *Brexit*. Pada saat sebelum *Brexit*, pelajar yang berasal dari Uni Eropa hanya memerlukan dokumen-dokumen resmi seperti paspor, surat rekomendasi dari yayasan atau universitas yang telah dituju oleh pelajar dan surat bukti bahwa pelajar tersebut telah diterima di universitas tersebut. Sedangkan pelajar dari luar Uni Eropa harus ditambahkan dengan surat lulus uji kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL/IELTS), dan kemampuan finansial untuk dapat membiayai biaya kehidupan untuk mendapatkan visa tingkat 3. Namun kebijakan visa tingkat 3 setelah Referendum *Brexit*, pelajar yang berasal dari Uni Eropa maupun dari luar Uni Eropa harus menempuh prosedur yang sesuai dengan kebijakan visa bagi para pelajar dari luar Uni Eropa dan syarat-syarat tersebut dielaborasi menggunakan poin.

Dengan mengetahui tingkat visa yang akan diperoleh imigran, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan visa tersebut juga berbeda sesuai dengan maksud dan tujuan imigran datang ke Inggris. Menurut Parlemen Inggris, syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Datang untuk Wisata (*Come to Visit*)

Semua imigran dari semua belahan dunia dapat berkunjung ke Inggris dengan

hanya membayar biaya untuk mendaftar aplikasi visa untuk tujuan wisata dan hanya berlaku selama 30 hari. Dalam jangka waktu tersebut, imigran dapat melakukan berbagai aktivitas sosial seperti mengunjungi keluarga, ataupun liburan (sebagai turis). Aksesibilitas visa dengan tujuan wisata bisa didapatkan oleh semua imigran dengan jangka waktu paling lama 30-60 hari, di dalam jangka waktu tersebut imigran dapat mendatangi ataupun keluar dari Inggris. Akan tetapi, imigran yang ingin menetap lebih lama harus kembali mendaftarkan diri ke dalam visa yang tujuannya untuk menetap di Inggris.

b. Datang untuk Bekerja (*Come to Work*)

Imigran yang datang dengan tujuan bekerja harus memenuhi kriteria wajib di atas 50 poin, 20 poin kombinasi lainnya akan didapat dari total jumlah gaji yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut, bekerja di setengah pengangguran atau memiliki gelar yang relevan untuk pekerjaan tersebut. Minimal gaji per-tahun yang harus dipenuhi oleh para pekerja yang ingin bekerja di Inggris berjumlah £20.480. Selain itu juga imigran harus lulus uji kemampuan berbahasa Inggris. Dengan total jumlah 20 poin tambahan yang dapat diperoleh para pekerja di Inggris apabila ingin memperbaharui visanya akan disesuaikan dengan pekerja tersebut, dengan misalkan apabila pekerja belum mencapai batas minimum gaji yang diperoleh per-tahunnya akan tetapi pekerja tersebut memiliki tingkat pendidikan atau keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya maka poin tersebut dapat diperoleh. Oleh karena itu, sistem kebijakan imigrasi berbasis poin tersebut akan memerlukan waktu yang cukup lama agar dampak dari kebijakan baru tersebut dapat dirasakan.

c. Datang untuk Belajar (*Come to Study*)

Pelajar yang ingin melanjutkan tingkat pendidikannya di Inggris harus menempuh 70 poin. Poin yang berjumlah 50 didapatkan dari dokumen yang berisikan tentang rincian konfirmasi telah diterimanya pelajar tersebut di universitas atau institusi akademik yang ada di Inggris, jurusan yang akan ditempuh, persyaratan kualifikasi yang sudah disetujui, tingkat akademik yang akan ditempuh, hingga tempat studinya. Sisa 20 poin diperoleh dari kemampuan Inggris yang dimiliki oleh pelajar tersebut dan syarat minimum finansial yang harus dimiliki oleh imigran tersebut. Selain persyaratan yang harus dialui untuk dapat masuk ke Inggris, pelajar

yang sudah menempuh tahun ajarannya di Inggris harus kembali melaporkan kegiatan akademik ke imigrasi Inggris apabila pelajar tersebut memutuskan untuk keluar dari Inggris dan mengakhiri visa khusus untuk pelajar.

KESIMPULAN

Sesuai dengan pendekatan Neorealisme yang digunakan oleh peneliti yang mana neorealisme memandang suatu aktor (negara) akan lebih mengutamakan keuntungan relatif dibandingkan dengan keuntungan absolut. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Inggris. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah memberikan dampak yang baik terhadap negara anggotanya, Inggris lebih mengutamakan upaya pencapaian kepentingannya yaitu *Global Britain*.

Dengan baru terealisasikannya kebijakan baru Inggris yaitu *Points-Based Immigration* pada tahun 2019 yang pada saat itu juga merupakan masa transisi Inggris dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan barunya sampai awal tahun 2020. Berdasarkan data yang sudah diteliti oleh peneliti, kebijakan baru tersebut dapat dikatakan berhasil dalam langkah mencapai *Global Britain* dikarenakan jumlah imigran yang tercatat menunjukkan bahwa jumlah imigran yang berasal dari luar Uni Eropa meningkat dengan sisi lain imigran yang berasal dari Uni Eropa menurun. Implementasi kebijakan luar negeri Inggris tersebut dilakukan dengan tujuan agar para imigran yang akan memasuki Inggris memiliki peluang yang sama dan juga memudahkan para imigran untuk dapat melanjutkan pekerjaan dan pendidikan yang lebih dalam lagi di Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jackson, R. & Sorensen, G., 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. 5th Edisi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Koenjaraningrat, 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Siyoto, D. S., 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wadsworth, J., 2016. *Brexit and the Impact of Immigration on the UK*. London: The London School of Economics and Political Science.

Jurnal

Chong, C., 2017. Understanding the Structures and Contents of National Interests : An Analysis of Structural Equation Modeling. *The Korean Journal of International Studies*, 15(3), p. 399.

Skripsi

Tidore, M. D., 2017. Skripsi. *Dinamika Referendum Inggris di Uni Eropa (Studi Kasus: Referendum Brexit*, Makassar: Universitas Hassanudin.

Internet

Institute For Government, 2016. *Brexit Brief: Article 50*. [Online] Tersedia di: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/brexit/brexit-brief-article-50>